



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS  
BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 108 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah untuk kedua kalinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 108 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 108 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 108 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PEKALONGAN.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 108 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 108 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 39), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kelas 14

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 14	1	1	0
Kelas 13	0	0	0
Kelas 12	1	1	0
Kelas 11	2	11	-9
Kelas 10	0	0	0
Kelas 9	7	18	-11
Kelas 8	4	40	-36
Kelas 7	8	30	-22
Kelas 6	26	68	-42
Kelas 5	16	82	-66
Kelas 3	16	81	-65
Kelas 1	0	1	-1
Jumlah	81	333	-252

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebakaran Ahli Madya	11	0	6	-6
Penyuluh Hukum Ahli Madya	11	0	2	-2
Polisi Pamong Praja Ahli Madya	11	0	1	-1

Sekretaris Satuan
Kelas 12

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan				
Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian				
Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	3	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	1	0	1	-1

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
Kelas 11

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kelas 11

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian				
Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	8	0	2	-2
Polisi Pamong Praja Penyelia	8	0	10	-10
Polisi Pamong Praja Terampil	7	0	10	-10
Polisi Pamong Praja Mahir	6	4	14	-10
Polisi Pamong Praja Pemula	5	0	10	-10
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Operator Layanan Operasional	5	10	10	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0
Operator Layanan Operasional	3	16	80	-64

Kepala Seksi Penindakan				
Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	3	-3
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat				
Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan				
Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8	3	3	0
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebakaran Ahli Muda	9	0	6	-6
Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	0	2	-2

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	0	3	-3

UPTD
------

Keterangan :  
 KL : Kelas Jabatan  
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia  
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja  
 S : Selisih

1. UPTD PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kepala UPTD Pemadam Kebakaran
Kelas 9

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebakaran Ahli Pertama	8	0	17	-17
Pemadam Kebakaran Penyelia	8	0	6	-6

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD				
Kelas 8				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pemadam Kebakaran Mahir	7	0	6	-6
Pemadam Kebakaran Terampil	6	0	21	-21
Pemadam Kebakaran Pemula	5	0	36	-36
Pengelola Layanan Operasional	6	19	21	-2
Operator Layanan Operasional	5	0	16	-16
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009